

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU SD DALAM MENDORONG TRANSFORMASI PENDIDIKAN DASAR BERKUALITAS

Rizki Ananda¹, Vonny Nadira², Nelvi Arianti³, Marvina Al-Fikamza⁴, Amlan Sayuti⁵

^{1,2,3,4,5} PGSD, FKIP, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id,²Vonnynadira2@gmail.com,

³nelviarianti9@gmail.com,⁴alfikamazamarvina@gmail.com,⁵udoyuni1@gmail.com

ABSTRACT

Quality primary education serves as a fundamental pillar in developing competent human resources. One of the Indonesian government's strategic policies to ensure educational equity is the implementation of teacher certification programs at the elementary school level, aimed at enhancing teachers' professional competence as agents of instructional transformation. This study seeks to evaluate the effectiveness of the elementary school teacher certification policy in improving learning quality and promoting transformation in basic education. Employing a qualitative method through a literature review approach, this research examines academic articles, policy reports, and scholarly literature from the past decade. The findings reveal that while certification enhances teacher motivation and professional recognition, its impact on instructional practices and student learning outcomes remains limited. Certification tends to be administrative in nature and is not yet fully integrated with continuous professional development initiatives. This study contributes to educational policy discourse by offering critical insights into the need for redesigning performance-based certification systems and reinforcing post-certification training as part of a more equitable and quality-driven basic education reform.

Keywords: teacher certification, primary education, learning quality, policy evaluation

ABSTRAK

Pendidikan dasar yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan adalah melalui program sertifikasi guru SD, yang bertujuan meningkatkan kompetensi profesional guru sebagai agen transformasi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sertifikasi guru SD dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendorong transformasi pendidikan dasar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, mengkaji berbagai artikel jurnal, laporan kebijakan, dan literatur akademik dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi mampu meningkatkan motivasi guru dan pengakuan profesional, dampaknya terhadap perubahan praktik pembelajaran dan hasil belajar siswa masih terbatas. Sertifikasi cenderung

bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan profesional berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan ulang desain kebijakan sertifikasi berbasis kinerja nyata serta memperkuat pelatihan pascasertifikasi sebagai bagian dari upaya transformasi pendidikan dasar yang lebih merata dan berkualitas.

Kata Kunci: sertifikasi guru, pendidikan dasar, kualitas pembelajaran, evaluasi kebijakan

A. Pendahuluan

Peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia dan daya saing nasional di masa depan. Pendidikan dasar, sebagai fondasi awal pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik, memiliki peran strategis dalam membentuk generasi produktif, kritis, dan adaptif terhadap tantangan global. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan dasar harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu bagi seluruh warga negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, ketimpangan kualitas guru, serta rendahnya hasil asesmen belajar siswa. Laporan Kemendikbudristek

(2021) mencatat bahwa hasil Asesmen Nasional tahun 2021 menunjukkan bahwa 66% siswa SD belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Dalam konteks ini, sertifikasi guru SD diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kinerja guru, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, efektivitas implementasinya masih diperdebatkan dalam banyak studi ilmiah, yang mempertanyakan apakah sertifikasi telah berbanding lurus dengan kualitas pengajaran yang berdampak pada transformasi pembelajaran (Prabowo et al., 2021; Hartati & Sumarsono, 2022; Mulyasa, 2023; Rahmah & Abdullah, 2023).

Guru memegang peran sentral dalam menciptakan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan. Di tingkat sekolah dasar (SD), guru tidak hanya berfungsi sebagai

penyampai materi, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan agen transformasi sosial. Dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional, guru dianggap sebagai pelaku utama dalam menjamin kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan mutu guru melalui program sertifikasi dipandang sebagai strategi strategis untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Program sertifikasi guru SD mulai diimplementasikan sejak tahun 2007 sebagai bagian dari reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme pendidik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap guru yang mengajar telah memenuhi standar kompetensi profesional yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sertifikasi ini memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi guru, sekaligus memberikan insentif finansial berupa tunjangan profesi. Namun, banyak

penelitian terbaru mempertanyakan sejauh mana sertifikasi tersebut benar-benar menghasilkan transformasi nyata dalam praktik pengajaran. Studi menunjukkan adanya kecenderungan bahwa proses sertifikasi cenderung administratif dan belum sepenuhnya berdampak pada perubahan substansi pembelajaran di kelas (Utami & Hadi, 2021; Marzuki et al., 2022).

Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah efektivitas kebijakan sertifikasi guru SD dalam mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Meski secara formal guru yang telah tersertifikasi dianggap lebih profesional, namun data menunjukkan hasil belajar siswa Indonesia dalam asesmen nasional maupun internasional masih relatif rendah. Misalnya, skor Indonesia dalam PISA 2018 menempatkan siswa Indonesia pada peringkat ke-74 dari 79 negara, khususnya dalam aspek literasi membaca dan matematika dasar (OECD, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sertifikasi telah memberikan dampak nyata terhadap kompetensi guru dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu,

penting dilakukan kajian literatur secara mendalam untuk mengevaluasi kembali arah dan dampak dari kebijakan ini (Rahman & Lestari, 2023; Suherman & Kurniawati, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi sertifikasi guru di Indonesia, masih terdapat celah teoritis dan empiris yang belum terjawab secara komprehensif. Sebagian besar studi cenderung menyoroti aspek administratif atau dampak finansial dari program sertifikasi, tanpa mengevaluasi secara mendalam perubahan nyata dalam praktik pembelajaran atau peningkatan kompetensi pedagogis guru setelah memperoleh sertifikat. Misalnya, penelitian oleh Putra et al. (2021) lebih menekankan pada korelasi antara status sertifikasi dan kesejahteraan guru, sementara studi oleh Lestari & Sulaiman (2022) menunjukkan bahwa sertifikasi belum memberikan perbaikan signifikan dalam penguasaan materi ajar di kelas. Selain itu, analisis oleh Widodo dan Hartini (2023) mengungkap bahwa proses sertifikasi belum berbasis pada pengukuran kinerja aktual guru di kelas, sehingga

menimbulkan pertanyaan mengenai validitas instrumen evaluasi. Sementara itu, studi lain oleh Rahman (2020) menyarankan perlunya penguatan dalam pelatihan pascasertifikasi, namun belum menjelaskan secara rinci mekanisme monitoring dan tindak lanjutnya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang efektivitas kebijakan ini secara lebih kritis melalui studi pustaka yang fokus pada dimensi kualitas pembelajaran, bukan hanya formalitas administratif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar (SD) di Indonesia melalui pendekatan analisis literatur akademik yang komprehensif dan kritis. Evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah meningkatkan kompetensi profesional guru, tetapi juga untuk menelusuri keterkaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara konkret. Dalam tataran praktis, kajian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi para pemangku kebijakan pendidikan dalam merumuskan strategi yang

lebih terarah dan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam memperbaiki mekanisme sertifikasi agar tidak sekadar menjadi proses administratif yang bersifat simbolik. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik mengenai profesionalisme guru di era transformasi pendidikan. Implikasinya, temuan dari studi ini dapat menjadi acuan dalam perumusan ulang desain kebijakan sertifikasi yang lebih kontekstual, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21, termasuk penguatan sistem monitoring pascasertifikasi, integrasi dengan pelatihan berkelanjutan, dan penilaian berbasis kinerja nyata di kelas. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam menjembatani kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai strategi utama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sertifikasi guru SD dalam mendorong transformasi pendidikan

dasar. Data dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber ilmiah, termasuk artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan kebijakan pendidikan dari instansi pemerintah seperti Kemendikbudristek, serta buku-buku akademik relevan yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* tematik dengan pendekatan deskriptif-kritis, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antarkonsep dari literatur yang dianalisis. Kriteria inklusi meliputi dokumen yang membahas dampak sertifikasi terhadap kompetensi guru dan kualitas pembelajaran di tingkat SD, sedangkan eksklusi diterapkan pada publikasi yang tidak relevan secara metodologis maupun substansial. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan konsep, yakni dengan membandingkan temuan antarjenis dokumen dan teori yang digunakan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan metodologis dari studi terdahulu yang menekankan pentingnya sintesis kritis dalam studi literatur pendidikan (Snyder, 2019;

Xiao & Watson, 2019; Torraco, 2020; Boell & Cecez-Kecmanovic, 2021), sehingga menghasilkan analisis yang tajam, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Sertifikasi terhadap Kompetensi Guru

Hasil dari analisis literatur menunjukkan bahwa sertifikasi guru SD telah berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja guru dan penguatan pengetahuan pedagogik dasar. Guru yang telah bersertifikat umumnya merasa lebih percaya diri dalam mengelola kelas, memahami kurikulum, serta mengaplikasikan teori pembelajaran. Hal ini sesuai dengan temuan Lestari dan Sulaiman (2022) yang menyebutkan bahwa sertifikasi meningkatkan rasa tanggung jawab profesional guru terhadap proses pembelajaran. Namun, peningkatan ini belum secara konsisten diikuti oleh perubahan dalam praktik kelas yang berdampak pada pembelajaran bermakna. Banyak guru tetap menerapkan

metode mengajar konvensional meskipun telah tersertifikasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa proses sertifikasi cenderung bersifat administratif dan belum benar-benar mengevaluasi kinerja aktual guru di kelas. Putra et al. (2021) mencatat bahwa sebagian guru hanya berorientasi pada insentif finansial yang menyertai sertifikasi, bukan pada pembaruan pedagogis. Hal ini menimbulkan bias antara status formal dan kinerja riil guru di lapangan. Dengan kata lain, profesionalisme tidak selalu sejalan dengan status tersertifikasi.

Dampak terhadap Kualitas Pembelajaran dan Hasil Belajar Siswa

Evaluasi terhadap kualitas pembelajaran menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa literatur mencatat adanya korelasi positif antara guru bersertifikat dan peningkatan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, dampaknya terhadap hasil belajar siswa belum menunjukkan konsistensi yang signifikan secara nasional. Laporan PISA 2018 menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam aspek literasi dan numerasi, meskipun

program sertifikasi telah berjalan lebih dari satu dekade (OECD, 2019). Rahman dan Lestari (2023) menekankan bahwa peningkatan kualitas guru tidak otomatis menghasilkan kenaikan skor belajar tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang menyeluruh.

Studi komparatif oleh Widodo dan Hartini (2023) yang membandingkan guru SD bersertifikat dan non-sertifikat menunjukkan bahwa perbedaan kinerja mengajar antar keduanya cenderung tipis, terutama di wilayah terpencil. Ini menunjukkan bahwa variabel lain seperti pelatihan lanjutan, fasilitas sekolah, dan manajemen kepala sekolah juga memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pembelajaran.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru SD terletak pada struktur pelatihan yang tidak berkelanjutan serta pendekatan yang terlalu administratif. Sertifikasi seringkali diproses tanpa adanya asesmen berbasis praktik nyata atau observasi langsung di ruang kelas. Selain itu,

ketimpangan antarwilayah dalam hal akses pelatihan dan pendampingan profesional sangat tinggi. Guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mengalami kesulitan dalam mengikuti proses sertifikasi dan pengembangan diri karena keterbatasan sarana digital dan jaringan pembina.

Persepsi guru juga menjadi faktor penting. Beberapa guru melihat sertifikasi hanya sebagai syarat formal untuk memperoleh tunjangan profesi, bukan sebagai langkah peningkatan mutu pengajaran. Hal ini diperkuat oleh temuan Utami dan Hadi (2021) yang mencatat rendahnya internalisasi nilai-nilai profesionalisme pascasertifikasi.

Alternatif dan Strategi Perbaikan

Literatur menyarankan perlunya transformasi kebijakan sertifikasi dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis kinerja atau *performance-based certification*. Model ini menekankan pada asesmen lapangan, rekaman praktik mengajar, dan pelibatan langsung kepala sekolah dalam proses evaluasi. Sertifikasi tidak boleh menjadi proses satu kali, melainkan harus terintegrasi dengan

pengembangan profesional berkelanjutan atau *continuous professional development* (CPD).

Strategi reformasi juga mencakup digitalisasi pelatihan guru SD, terutama dalam konteks pembelajaran daring dan hybrid yang menjadi keniscayaan pasca-pandemi. Digitalisasi ini harus mencakup modul pelatihan adaptif, sistem mentoring jarak jauh, dan platform evaluasi berbasis bukti. Reformasi kebijakan seperti ini juga sejalan dengan arah transformasi SDM pendidikan dalam *Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024* yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas guru melalui pembelajaran sepanjang hayat.

Program sertifikasi guru SD di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru demi menciptakan pembelajaran berkualitas. Temuan studi pustaka menunjukkan bahwa sertifikasi mampu mendorong motivasi intrinsik guru dan menumbuhkan kesadaran terhadap tanggung jawab profesi. Akan tetapi, efeknya terhadap praktik pembelajaran di ruang kelas masih bersifat inkonsisten. Hal ini menandakan adanya celah antara

pengakuan formal melalui sertifikat dan perubahan substansial dalam praktik mengajar. Proses sertifikasi cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis pada penilaian langsung terhadap kualitas instruksional guru. Akibatnya, status tersertifikasi belum secara otomatis menjamin peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan, terutama di sekolah-sekolah dasar di wilayah marginal.

Dari sisi pelaksanaan kebijakan, tantangan yang muncul berasal dari minimnya pelatihan lanjutan dan tidak adanya sistem monitoring yang memadai. Guru di daerah 3T mengalami hambatan struktural yang membuat proses sertifikasi sulit diakses dan tidak memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan mutu. Persepsi guru terhadap sertifikasi juga masih bias, banyak di antaranya memandang sertifikasi sebagai alat memperoleh tunjangan daripada sebagai mekanisme peningkatan kualitas diri. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya internalisasi nilai profesionalisme guru dan lemahnya integrasi antara kebijakan sertifikasi dan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang

seharusnya berjalan simultan. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi mendalam baik dalam substansi kebijakan maupun pola pelaksanaannya.

Sebagai alternatif solutif, diperlukan perubahan paradigma dalam kebijakan sertifikasi guru menuju model yang berbasis pada kinerja dan praktik nyata di ruang kelas. Sertifikasi sebaiknya dikaitkan secara erat dengan program *continuous professional development* (CPD) yang dievaluasi secara periodik melalui observasi kelas, rekaman praktik mengajar, serta portofolio pengembangan kompetensi. Di sisi lain, digitalisasi pelatihan dan asesmen guru juga perlu dimasifkan agar akses lebih merata dan pelaksanaan lebih efisien. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individual guru, tetapi juga mendorong transformasi sistemik dalam pengelolaan mutu pendidikan dasar, sesuai arah kebijakan nasional dalam Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020–2024.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru SD

di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan motivasi dan pengakuan profesional terhadap guru, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa sertifikasi seringkali masih bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek substansial dalam praktik pedagogik di ruang kelas. Selain itu, dampaknya terhadap hasil belajar siswa tidak menunjukkan korelasi yang konsisten, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Hambatan dalam implementasi, seperti ketimpangan akses, kurangnya pelatihan lanjutan, serta persepsi guru yang memandang sertifikasi hanya sebagai syarat administratif, turut memperlemah esensi dari program ini. Oleh karena itu, kebijakan sertifikasi perlu didesain ulang dengan pendekatan berbasis kinerja aktual dan terintegrasi dengan pengembangan profesional berkelanjutan (CPD). Implikasi praktis dari penelitian ini mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat sistem pelatihan

pascasertifikasi, memperluas akses pelatihan berbasis digital, serta membangun sistem evaluasi berkelanjutan yang fokus pada kualitas pengajaran. Secara teoritis, studi ini memberikan kontribusi dalam mengkritisi kesenjangan antara pengakuan formal profesionalisme guru dan realitas mutu pendidikan dasar yang dihasilkan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P., & Suhadi, J. (2021). Implementation of Teacher Certification in Remote Areas: A Policy Evaluation. *Journal of Education and Practice*, 12(4), 75–82. <https://doi.org/10.7176/JEP/12-4-09>
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2021). On being 'systematic' in literature reviews. *Journal of Information Technology*, 36(3), 257–269. <https://doi.org/10.1177/0268396220944401>
- Fathurrohman, M. (2021). Policy Evaluation of Teacher Certification Program in Indonesia: A Literature Study. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1), 57–66. <https://doi.org/10.23887/jip.v10i1.32905>
- Fauzi, A., & Widodo, S. (2020). Professional Development of Teachers through Certification: A Systematic Literature Review. *Indonesian Journal of Educational Review*, 7(2), 33–42. <https://doi.org/10.21009/IJER.072.04>
- Hakim, A. R., & Aini, N. (2021). Teacher Certification and Quality of Learning: Is There a Direct Correlation? *Education Quarterly Reviews*, 4(3), 243–251. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.04.03.284>
- Handayani, R., & Sari, N. P. (2022). The Influence of Teacher Certification on Learning Outcomes in Mathematics. *Journal of Educational Research and Practice*, 12(1), 93–102. <https://doi.org/10.55999/jerp.122934>
- Hartati, S., & Sumarsono, R. B. (2022). Evaluating the Impact of Teacher Certification on Elementary Education Quality in Indonesia. *International Journal of Educational Policy Research and Review*, 9(2), 45–55. <https://doi.org/10.15739/IJEPRR.22.005>
- Hasanah, I., & Marzuki, M. (2020). Pedagogic and Professional Competence after Certification: Evidence from Rural Teachers. *Journal of Educational Studies*, 6(2), 89–97. <https://doi.org/10.20448/jes.v6i2.3123>
- Iskandar, S., & Fitria, T. N. (2022). Teachers' Perceptions on the Benefit of Certification for Career Development. *Journal of Educational Management and Leadership*, 4(1), 51–60. <https://doi.org/10.15294/jeml.v4i1.5620>

- Kurniasih, H., & Winarsih, S. (2022). Certification Policy and Its Impact on Teacher Identity and Classroom Practice. *Journal of Education and Social Studies*, 10(3), 112–120. <https://doi.org/10.18488/jess.v10i3.4556>
- Lestari, Y., & Sulaiman, M. (2022). The Impact of Teacher Certification on Pedagogical Content Knowledge in Elementary Education. *Journal of Educational Research and Innovation*, 10(2), 95–104. <https://doi.org/10.31002/jeri.v10i2.5812>
- Maulana, R., & Harjanto, T. (2021). Are Certified Teachers Better? Evidence from Urban Public Schools in Java. *Indonesia Journal of Educational Assessment*, 14(2), 133–142. <https://doi.org/10.21831/ijea.v14i2.40275>
- Mulyasa, E. (2023). Reformasi Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional: Analisis Kritis Kebijakan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i1.3276>
- Nurhasanah, N., & Fauziah, L. (2020). Barriers to Effective Implementation of Teacher Certification. *International Journal of Educational Research Review*, 5(3), 97–106. <https://doi.org/10.24331/ijere.742223>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- Prabowo, A., Santoso, T., & Nugroho, H. (2021). The Role of Teacher Certification in Improving Student Learning Outcomes in Indonesian Primary Schools. *Journal of Educational Development*, 9(1), 12–20. <https://doi.org/10.15294/jed.v9i1.4002>
- Putra, R. A., Nugroho, H., & Fitriyani, D. (2021). Teacher Certification and Welfare: A Study on Motivation and Performance. *Asian Education Studies*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.20448/edu.v6i1.3391>
- Rachmadtullah, R., Zulela, M. S., & Sumantri, M. S. (2020). Teacher's Performance and Competence: A Case Study in Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, 8(3), 630–638. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080301>
- Rahman, T., & Lestari, D. (2023). Assessing the Impact of Teacher Professional Certification on Learning Outcomes in Basic Education. *Asian Journal of Education and Training*, 9(1), 17–24. <https://doi.org/10.20448/journal.522.2023.91.17.24>
- Ramdani, Z., & Maulida, F. (2020). Education Reform and Teacher Certification in Indonesia: A Critical Perspective. *Policy and Education Journal*, 15(4), 122–130. <https://doi.org/10.22373/pej.v15i4.7130>

- Snyder, H. (2019). Literature reviews as a research strategy: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryadi, B., & Azizah, S. (2023). Strengthening Post-Certification Programs for Teachers in Indonesia. *Journal of Teacher Education Research*, 13(2), 144–153. <https://doi.org/10.21009/jter.13212>
- Susanti, R., & Prasetyo, Z. K. (2023). Teacher Certification and Its Contribution to Instructional Innovation in Elementary Schools. *Asian Journal of Contemporary Education*, 7(1), 34–42. <https://doi.org/10.18488/ajce.v7i1.3217>
- Syahputra, M., & Herlina, D. (2023). Reviewing the Implementation of Performance-Based Teacher Certification. *International Journal of Educational Best Practices*, 7(2), 77–85. <https://doi.org/10.31258/ijebp.v7n2.p77-85>
- Torraco, R. J. (2020). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 19(4), 430–452. <https://doi.org/10.1177/1534484320959797>
- Utami, W., & Hadi, S. (2021). The Dilemma of Teacher Certification in Indonesia: Between Professional Development and Administrative Formalism. *Jurnal Kependidikan*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.21831/jk.v9i1.4021>
- Widodo, R., & Hartini, A. (2023). Comparing Certified and Non-certified Teachers' Classroom Practices in Indonesian Rural Schools. *Journal of Education Policy and Practice*, 14(2), 67–76. <https://doi.org/10.31002/jepp.v14i2.6094>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yanto, H., & Huda, M. (2023). Enhancing Teacher Professionalism through Certification and Digital Training. *Education and Information Technologies*, 28, 491–505. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11705-8>
- Yulianti, K., & Permana, D. (2021). Teacher Certification, Job Satisfaction, and Instructional Quality. *Asian Social Science and Humanities Research Journal*, 9(1), 19–28. <https://doi.org/10.20448/asshr.v9i1.3786>